

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya (Studi di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)

Noviyanti ^{1,*}, Hesti Inggri Noviani ², Sovianti Octaviasari ³, Noor Kemalia ⁴, Fahmi Bargoyah ⁵, Deevana Baihaqy ⁶, Putri Septiani Zulfa ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Vokasi, Universitas Negeri Surabaya, Ketintang, Surabaya, 60231, Indonesia *

¹ noviyanti@unesa.ac.id; ² hestiinggritnasution@gmail.com; ³ soviанти.21098@mhs.unesa.ac.id;

⁴ noor.21095@mhs.unesa.ac.id; ⁵ fahmeetop@gmail.com; ⁶ deevanabai07@gmail.com;

⁷ putrisseptiani.20003@mhs.unesa.ac.id

* **corresponding author**

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 08-02-2023

Revised : 08-06-2023

Accepted : 26-06-2023

Keywords :

Waste Management ;

Policy Implementation ;

Waste Bank ;

George Edward III ;

ABSTRACT

Improper waste management has the potential to cause disease, slum settlements, and natural disasters. Ngagelrejo Village, Wonokromo District, Surabaya City established a waste bank based on Regional Regulation of Surabaya City No. 1 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation of Surabaya City No. 5 of 2014 concerning Waste Management and Cleanliness in the City of Surabaya as an effort to implement waste management policies. This study aims to describe the implementation of waste management policies through Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS). This type of research is descriptive research with a qualitative approach, which focuses on George Edward III's theory with indicators including: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Resources have been fulfilled with the intervention of the foundation. The disposition has gone well starting from the appointment of executors and the provision of incentives. The organizational structure has been contained in the SOP compiled by the Bina Bhakti Environmental Foundation and under the guidance of PT. PLN (Persero).

PENDAHULUAN

Jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, dalam laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada tingkat konsumsi yang tinggi juga. Dampak yang terjadi secara langsung berupa meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan manusia dari tingkat konsumsi yang semakin meningkat. Permasalahan umum mengenai sampah yang terjadi di beberapa negara berkembang termasuk negara Indonesia adalah ketidakmampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan mereduksi sampah. Pada tahun 2021, Data SIPSN [1] menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional sebesar 30.881.803,15 ton/tahun sedangkan jumlah sampah nasional yang tidak terkelola sebesar 10.943.502,29 ton/tahun. Kerusakan lingkungan merupakan dampak terbesar. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia menggunakan lingkungan sebagai penunjang kehidupan. Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Menurut hasil sensus penduduk pada bulan September tahun 2020. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar 2,87 juta jiwa. Kota Surabaya memiliki luas wilayah 326,81 km², dengan hal itu Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk sebesar 8.795 jiwa per km² pada tahun 2020. Dari data kepadatan penduduk tersebut secara otomatis tingkat konsumtif dan pengeluaran limbah semakin banyak dan timbul permasalahan berupa beban timbulan sampah yang terus meningkat. Permasalahan sampah yang tidak diikuti dengan solusi maupun perbaikan akan menimbulkan kembali permasalahan lain yang kompleks.

Data SIPSN juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Kota Surabaya menghasilkan timbulan sampah sebesar 811.255,10 ton/tahun sedangkan jumlah sampah Kota Surabaya yang tidak terkelola sebesar 28.578,82 ton/tahun [1]. Permasalahan yang ditimbulkan antara lain berbagai penyakit, kota kotor, pemukiman kumuh, dan bencana banjir. Menurut Widyawati et. al Permasalahan



sampah lain yang dihadapi oleh Kota Surabaya adalah masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan rendah mengenai sampah, sampah dianggap sebagai barang yang bau, kotor dan menjijikan [2]. Dengan pandangan tersebut menyebabkan masyarakat menganggap remeh terhadap pengelolaan sampah. Pandangan rendah terhadap sampah menyebabkan beban timbunan sampah terus meningkat karena tidak dilakukannya pengelolaan sampah dan proses reduksi sampah. Prinsip yang diterapkan untuk mendukung pengelolaan dan proses reduksi sampah adalah mempunyai pengetahuan atau wawasan tentang lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat dan disamping itu menimbulkan dampak yang positif yakni memberikan manfaat lebih dalam ekonomi dan mengubah perilaku gaya hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, pengelolaan sampah rumah tangga merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga sehari-hari yang dapat menurunkan penumpukan sampah, mendaur ulang sampah yang dapat digunakan kembali untuk kegunaan yang sama atau lainnya, dan bentuk aktivitas mengolah limbah rumah tangga agar dapat dijadikan produk baru. Salah satu upaya pengelolaan sampah di masyarakat adalah melalui bank sampah. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, maka pemerintah daerah membuat kebijakan pengolahan sampah melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2014 yang membahas tentang pengolahan sampah dan kebersihan di kota Surabaya pada BAB VA tentang Bank Sampah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembuangan sampah di Surabaya diatur di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Sampah yang dikumpulkan petugas langsung diserahkan ke TPS untuk kemudian dikirim ke TPA. Dalam modus ini, sampah tidak dipisahkan langsung dari sumbernya, sehingga para pendaur ulang sampah plastik tetap harus memisahkannya menurut sampah atau kategorinya. Oleh sebab itu, dilakukan pemilahan sampah dari sumbernya dengan mengklasifikasikan sampah menurut jenisnya antara lain sampah plastik, kayu, kaca/kaca, logam dan lain-lain.

Kegiatan tersebut terwujud melalui pendirian bank sampah yang tertuang pada PERDA Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya ini merupakan kebijakan yang berpusat pada pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat yang dapat mendirikan bank sampah. Bank sampah merupakan upaya untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah serta manfaat baik lainnya. Upaya penanggulangan sampah di kota Surabaya dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya program bank sampah. Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah anorganik.

Salah satu Bank Sampah yang terdapat di Surabaya adalah Bank Sampah Induk Surabaya yang terletak di Jl. Ngagel Tim No.26, RT.009/RW.06, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur. Berdirinya bank sampah pada lokasi ini disebabkan oleh kumuhnya pemukiman di tepi sungai wilayah Jagir kelurahan Ngagelrejo kecamatan Wonokromo kota Surabaya serta sistem pengelolaan sampah yang langsung dibuang ke sungai atau lahan kosong, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan sekitar khususnya pada kebersihan sungai. Dari banyaknya kekhawatiran yang muncul dari Kelurahan Ngagelrejo terkait belum adanya sistem pengelolaan sampah yang baik maka pemerintah setempat giat mendorong warga Kelurahan Ngagelrejo untuk berpartisipasi dalam program Bank Sampah Induk Surabaya. Hal ini yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan menjadi suatu tuntutan untuk dilaksanakan demi tercapainya kebersihan pemukiman dan ramah lingkungan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota surabaya melalui program bank sampah khususnya yang diadakan oleh Yayasan Bina Bhakti Lingkungan adalah bentuk program lanjutan dari program edukasi dan kelompok usaha Bank Sampah Unit di masyarakat.

Tujuan dari Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah berusaha untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Usaha yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Surabaya dalam menerapkan 3R sejak tahun 2010 ialah menjadikan atau mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang lebih bernilai dan bekerjasama dengan pihak lain untuk menjual kembali sampah. Menurut

Bank Sampah Induk Surabaya adalah Bank Sampah Induk satu-satunya yang dimiliki oleh Kota Surabaya dengan jumlah nasabah yang terdaftar di BSIS pada 2018 sebesar 10.300 nasabah perorangan dan 327 nasabah bank sampah unit [2]. Bank Sampah Induk Surabaya memperoleh penghargaan sebagai bank sampah terbaik oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan di tahun 2017 sehingga pada tahun tersebut pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional diadakan di Surabaya sebagai bentuk apresiasi kepada Kota Surabaya [3].

Oleh karena itu penulis menggunakan teori George Edward III untuk mengetahui indikator-indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) Desa Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dengan Program Bank Sampah Induk Surabaya” untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah induk Surabaya yang ada di Kelurahan Ngagelrejo kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dalam mengurangi volume sampah.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari Kebijakan Publik. Kebijakan pasti ditemukan dalam bidang pembangunan ekonomi, perumahan rakyat, di bidang kesehatan, pendidikan nasional, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi [4]. Kebijakan juga didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu [5].

Dalam sebuah kebijakan pasti membutuhkan dan mempengaruhi alokasi biaya sebagai upaya mencapai tujuan kebijakan. Pengaruh suatu kebijakan sehubungan dengan alokasi biaya dan manfaat mengenai para pelaku yang relevan, atau cara suatu kebijakan berupaya mempengaruhi perilaku individu sesuai dengan tujuan kebijakan tertentu [5]. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan segala tindakan yang terdapat aktor baik individu ataupun kelompok untuk membuat aturan serta upaya yang ada dalam kegiatan di berbagai tingkatan dan jenis pemerintahan demi mencapai tujuan kebijakan tertentu.

Implementasi Kebijakan

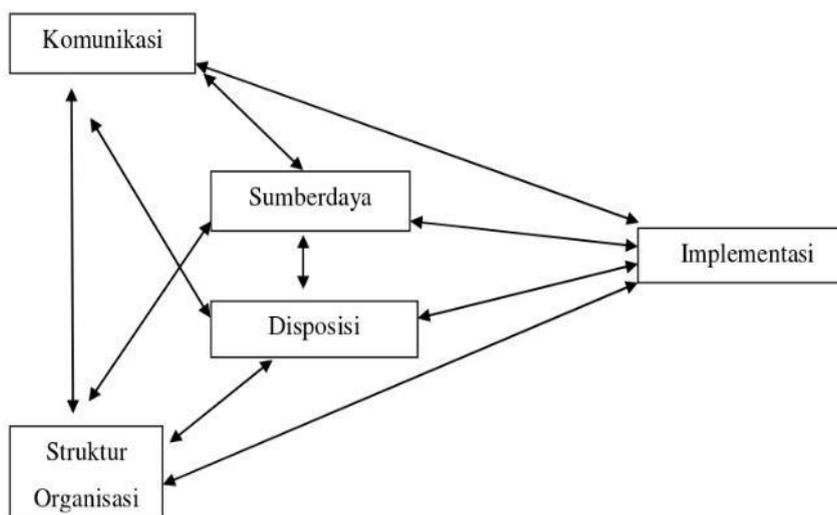
Implementasi kebijakan termasuk proses dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut berjalan dan apakah tepat untuk digunakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu [6]. Implementasi kebijakan juga diartikan sebagai aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan [7]. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan merupakan proses pencapaian tujuan kebijakan dalam jangka waktu tertentu.

Efektivitas implementasi kebijakan akan tercapai apabila terpenuhinya tiga prinsip [8]. Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada mampu menyelesaikan masalah. Kedua, apakah kebijakan yang diciptakan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.

Teori George Edward III

Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah Induk Surabaya yang dijalankan oleh yayasan Bina Bhakti Lingkungan di Kelurahan Ngagelrejo kecamatan Wonokromo berdasarkan teori George Edward III. Berdasarkan gambar 1, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan[9], antara lain:

Gambar 1. Model Implementasi George Edward III



1. Komunikasi, ditunjukkan dengan adanya pemberian informasi mengenai pengelolaan sampah pada Bank Sampah Induk Surabaya kepada masyarakat di kelurahan Ngagelrejo dengan melihat 3 dimensi, yakni: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumber daya. Sumberdaya dalam hal ini berfokus pada penekanan disetiap sebuah kebijakan yang harus didukung dengan sumber daya memadai, meliputi sumber daya manusia, sumberdaya alat, dan sumber daya finansial. Program bank sampah induk surabaya tersebut didukung oleh masyarakat kelurahan Ngagelrejo kecamatan wonokromo dalam keikutsertaannya mengikuti program dengan menjadi nasabah serta pengalokasian dana yang diperoleh dari penjualan sampah ke pengepul.
3. Disposisi, yang menekankan pada karakteristik yang berhubungan pada implementor kebijakan maupun pada program. Sebuah karakter yang dimiliki implementor meliputi komitmen yang dilihat dari sebuah konsistensi melaksanakan kebijakan dari awal pelaksanaan program bank sampah sampai saat ini, selanjutnya adalah karakter demokratis yang dilihat dari partisipasi aktif masyarakat Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dalam menunjang kesuksesan program yang dilakukan bank sampah induk surabaya.
4. Struktur birokrasi, berfokus dengan sebuah struktur birokrasi yang menjadi hal penting didalam implementasi kebijakan. Terdapat dua aspek penting yaitu, pertama ialah mekanisme program bank sampah induk surabaya dan SOP pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Bank Sampah

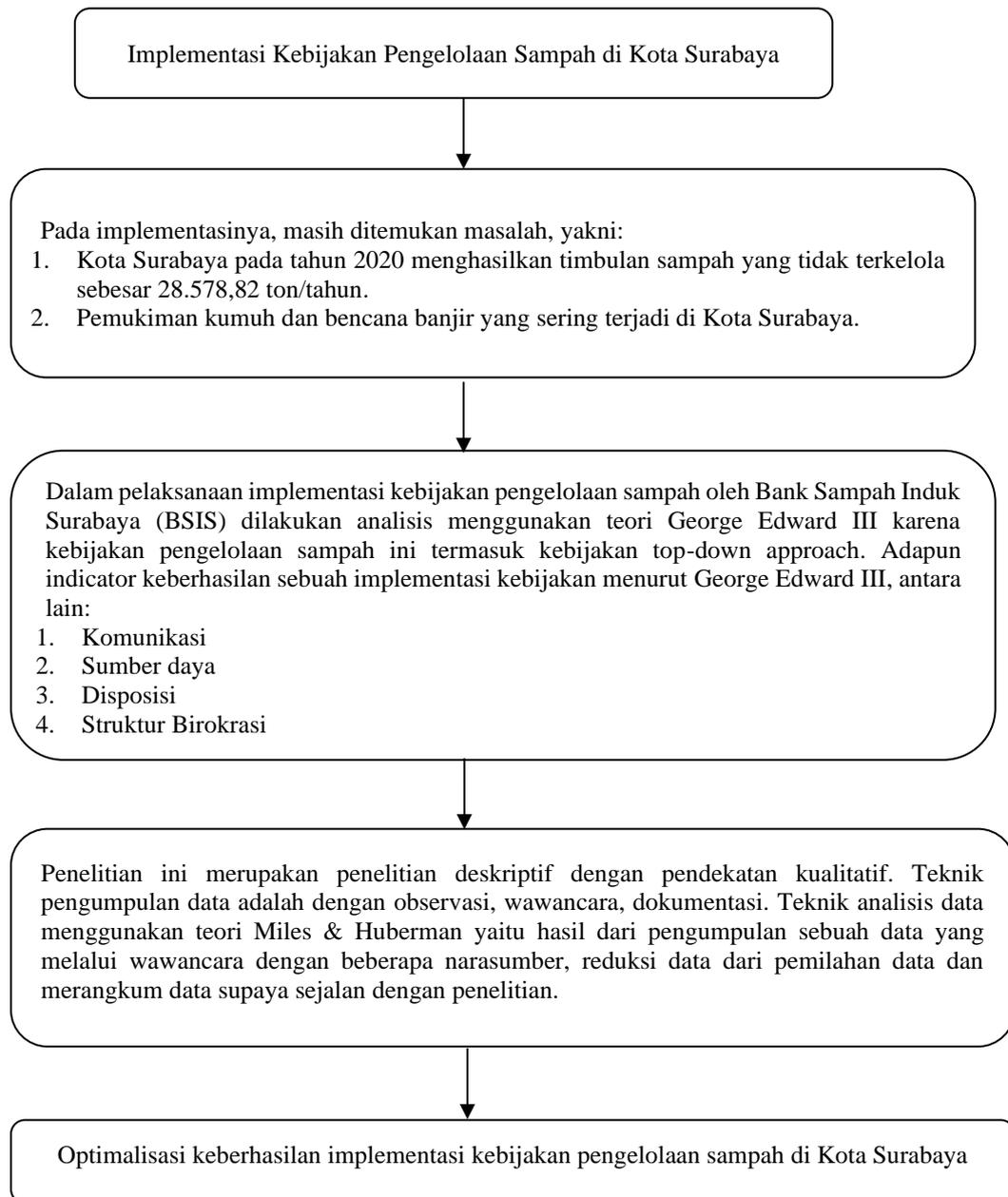
Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Dalam strategi nasional kebijakan penanganan sampah menggunakan program 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Hal ini berarti pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama. Pengelolaan sampah melalui bank sampah pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama bank sampah gemah ripah. Bank sampah didirikan karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, bank sampah mulai didirikan di daerah-daerah lain dan perkembangannya semakin meningkat.

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Kerangka Konseptual

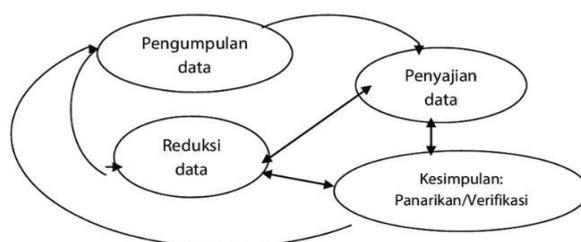
Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Surabaya sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan pendahuluan dan kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan adanya kerangka konsep dengan tujuan agar mudah dipahami. Kerangka konsep adalah penyederhanaan dari kerangka teori, artinya kerangka konsep dalam pelaksanaannya digunakan untuk memaparkan secara ringkas berdasarkan teori yang ada mengenai keterkaitan antara variable-variable penelitian sehingga menjadi susunan yang sistematis [10]. Kerangka konsep ini umumnya terdiri dari urgensi tema, permasalahan, focus pembahasan, metode penelitian, serta hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah kerangka konseptual (Bagan 1).

Bagan 1. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan sebuah data yang deskriptif berbentuk tulisan maupun lisan yang berasal dari pelaku yang diamati. Studi kualitatif mencakup informasi mengenai fitur unik dan lingkungan dari setiap kasus [11]. Artikel ini berfokus pada model implementasi dari George Edward III. Terdapat empat indikator sebagai penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah pada program Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS), kendala saat pelaksanaan program, penerimaan masyarakat atas kebijakan BSIS, serta keberhasilan yang diperoleh dari kebijakan bank sampah induk surabaya. Wawancara adalah sebuah percakapan antara peneliti (seseorang yang membutuhkan informasi) dengan informan atau narasumber (seseorang yang dinilai memiliki informasi penting mengenai suatu objek) [12]. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber antara lain: hubungan masyarakat Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, pegawai BSIS, pendiri dan kader Bank Sampah Unit Raflesia Kelurahan Ngagelrejo, nasabah BSIS, serta nasabah bank sampah unit Raflesia. Dokumentasi pada penelitian ini berupa buku petunjuk pengolahan sampah & Mekanisme Nasabah, struktur birokrasi BSIS, penyampaian informasi pengumpulan sampah BSU Raflesia, kegiatan BSU Raflesia sebagai binaan BSIS, kegiatan BSIS, metode rekrutmen BSIS



Gambar 2. Teknik Analisis Data Miles & Huberman

Setelah terkumpul data dan hasil observasi, tahap selanjutnya melalui analisis data dengan model interaktif (gambar 2). Model interaktif Miles & Huberman adalah hasil dari pengumpulan sebuah data yang melalui wawancara dengan beberapa narasumber, reduksi data dari pemilahan data dan merangkum data supaya sejalan dengan penelitian [13].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Ngagelrejo terletak pada Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yang merupakan salah satu wilayah padat penduduk serta terdapat kawasan kumuh di sekitar Sungai Jagir. Dalam kawasan kumuh tersebut juga masyarakatnya masih sering membuang sampah ke sungai/lahan kosong. Kesadaran yang kurang dan pengetahuan mengenai pengolahan sampah yang benar menjadi penyebab kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk tersebut membuat kawasan di sekitar Kelurahan Ngagelrejo sering terjadi banjir bila hujan deras. Terakhir banjir yang kerap melanda kawasan Ngagelrejo pada bulan Januari tahun 2022[14].

Hal ini yang mendorong pemerintah setempat serta mahasiswa untuk gencar mengedukasi serta memberikan sosialisasi mengenai bagaimana menjaga lingkungan sekitar, serta membuat warga terdorong untuk turut dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah Induk Surabaya. Berikut implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah melalui program Bank Sampah Induk Surabaya di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, berdasarkan teori George C Edwards III dengan indikator sebagai berikut:

Komunikasi

Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif jika adanya komunikasi yang baik antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target group). Komunikasi dapat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Tujuan dan sasaran kebijakan dapat diselarasskan dengan baik untuk menghindari adanya distorsi atas kebijakan [15].

Komunikasi dalam kebijakan adalah mereka yang melaksanakan kebijakan serta mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap kebijakan tersebut, transmisi, kejelasan serta konsistensi dari komunikasi harus diarahkan kepada pelaksana kebijakan secara jelas sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut [16]. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat tiga indikator menurut Edward III yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi [5], berikut beberapa indikator tersebut:

1) Dimensi Transmisi

Dimensi Transmisi ini bertujuan untuk penyaluran komunikasi yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik juga [17]. Permasalahan yang sering terjadi pada penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), ini disebabkan karena penyaluran komunikasi telah melewati beberapa tingkatan sehingga apa yang akan disampaikan terdistorsi di tengah jalan.

Pada Kebijakan pengelolaan sampah melalui program di Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) pada masyarakat di beberapa daerah di Surabaya sudah sangat baik karena penyampaian terkait Kebijakan pengelolaan sampah ini sudah cukup merata di Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran informasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai kepada pihak BSIS terutama terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo, seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul selaku tim Humas dari BSIS bahwa informasi terkait pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik. Beliau juga menjelaskan bahwa penyaluran komunikasi ini melalui sosialisasi di beberapa daerah di Kota Surabaya baik menghampiri daerah tersebut baik secara langsung dan tidak langsung seperti melalui virtual meeting terkait pengelolaan sampah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Untuk sosialisasi tersebut, rt/rw setempat akan berkolaborasi dahulu dengan akademisi dan komunitas untuk melaksanakan sosialisasi pengolahan sampah. Jika akademisi sudah selesai, maka BSIS akan melanjutkan nya. Hampir semua Universitas di Surabaya sudah berkolaborasi, terkait dengan sosialisasi ini dengan mahasiswa yang berkegiatan ukm, himpunan, maupun knk. Sosialisasi terkait pengolahan sampah ini juga sudah terealisasi di hampir semua kelurahan yang ada di Surabaya. Untuk penyampaian informasi secara tidak langsung akan disampaikan melalui media online seperti zoom atau Google Meeting yang akan dihadiri oleh warga setempat.

Penyaluran komunikasi melalui sosialisasi ini dilakukan oleh pihak BSIS kepada masyarakat terkait dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya yang bertujuan agar masyarakat menjadi sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah adanya penumpukan sampah agar tidak menyebabkan penyakit. Melalui lembaga ini, mereka juga menerima layanan untuk masyarakat sekitar agar menyimpan dan mengumpulkan sampah anorganik lalu diserahkan ke BSIS untuk dijadikan pundi-pundi rupiah dengan SOP yang berlaku.

Berdasarkan data terkait jumlah Bank Sampah Unit yang dikelola oleh BSIS sudah mencapai 327 unit dengan 3 kelurahan terbanyak di Kecamatan Wonokromo yang menyetorkan sampah di diantaranya Kelurahan Ngagelrejo sebanyak 19 unit, Kelurahan Ngagel sebanyak 7 unit dan Kelurahan Darmo sebanyak 4 unit. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan komunikasi pada dimensi transmisi telah dilaksanakan dalam lingkup BSIS dan Kelurahan Ngagelrejo yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mampu menerima informasi dengan baik dikarenakan kemampuan Ketua BSU Rafflesia dalam meneruskan informasi secara jelas dan rinci kepada warga baik secara langsung maupun tidak langsung.

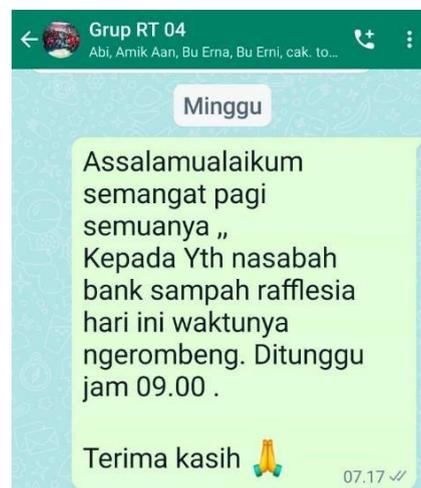
2) Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan ini bertujuan agar komunikasi yang disampaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan agar terhindar dari adanya kesalahpahaman. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan karena dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi dalam suatu kebijakan harus di paparkan dengan jelas agar dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan

harapan [18].

Pihak BSIS telah memberikan informasi tentang sosialisasi Bank Sampah Unit dan pengelolaan sampah kepada Kelurahan Ngagelrejo dan masyarakat sekitar terkait pelaksanaan sosialisasi baik melalui akun sosial media maupun web Bank Sampah Induk Surabaya yang memiliki tujuan agar seluruh warga dapat mengetahui informasi bahwasanya akan diadakan sosialisasi tentang kebijakan dan pengelolaan sampah dan dapat mendaftar menjadi nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut, undangan secara tertulis memang tidak ada, namun pada pihak BSIS dalam menyampaikan informasi dilakukan melalui menyebarkan postingan di sosial media maupun web Bank Sampah Induk Surabaya. Selain itu nasabah perorangan juga mendapatkan kemudahan fasilitas Bangkeling (bank sampah keliling) untuk mengambil sampah di bank sampah unit di wilayah nasabah atau sampah nasabah perorangan dengan persyaratan sampah yang dikumpulkan mencapai kuota minimal 200 kg untuk BSU.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyampaian informasi terkait jadwal pengumpulan sampah di salah satu BSU di Ngagelrejo “Bank Sampah Rafflesia” sendiri dilakukan melalui grup Whatsapp RT (Gambar 3) yang berisi warga RT 04 RW 09 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonromo. Grup Whatsapp ini tidak hanya digunakan BSU Rafflesia untuk menyampaikan informasi terkait pengumpulan sampah, untuk proses menimbang penyeteroran dan hasilnya disampaikan di grup tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat mengedukasi warga terkait pengelolaan sampah.



Gambar 3. Penyampaian Informasi Pengumpulan Sampah di BSU Rafflesia

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti terkait pelaksanaan pengumpulan sampah yang dilakukan nasabah ke BSU Rafflesia yang bertempat di Jl. Krukah Lama Buntu No.9 RT 04 RW 09, sebelum dilakukannya pengumpulan sampah warga setempat harus sudah memilah sampah tersebut karena yang bisa di serahkan hanya sampah anorganik, sampah tersebut akan disetorkan kepada BSU lalu pihak BSU akan mencatat kedalam buku tabungan. Setelah sampah tersebut terkumpul maka pihak BSU akan menghubungi pihak BSIS untuk mengangkut sampah tersebut dengan menggunakan fasilitas BANGKELING. Seperti yang dikatakan oleh Bu Lina selaku ketua dari BSU Rafflesia, tidak ada penjadwalan khusus untuk penjemputan sampah namun biasanya BSU Rafflesia ini sendiri menyeterorkan sampah ke BSIS sebulan sekali pada hari minggu di akhir bulan.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi kejelasan dalam melakukan komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat jelas minat kelurahan menyeterorkan sampah ke BSIS sehingga menjadi Kelurahan yang memiliki Bank Sampah Unit terbanyak di Kota Surabaya yang menyeterorkan hasil pengumpulan sampahnya ke BSIS dengan jumlah 19 Bank Sampah Unit.

3) Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi ini bertujuan agar informasi yang diberikan dapat konsisten sehingga tidak terjadi simpang siur atau menimbulkan suatu kebingungan terhadap penerima baik pelaksana kebijakan dan pihak terkait. Pada hal ini dapat diartikan dalam implementasi kebijakan harus memberikan konsistensi komunikasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan agar tidak menimbulkan suatu masalah terhadap pelaksana kebijakan dikarenakan penyampaian yang tidak konsisten sehingga berpengaruh terhadap tujuan dari kebijakan tersebut.

Pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo memiliki beberapa konsisten yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah. Jadwal penjemputan sampah telah diatur sedemikian rupa kepada Bank Sampah Unit yang bekerja sama dan nasabah perorangan. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat yang bekerjasama dengan BSIS mengetahui jadwal penjemputan sampah di lokasi mereka untuk mengambil sampah yang telah dipilih dan dikumpulkan, sehingga informasi terkait jadwal penjemputan sampah tidak simpang siur yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Untuk penjemputan sampah sendiri memiliki aturan yang berlaku, untuk pengambilan sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu berbayar dan gratis. Untuk penjemputan sampah berbayar tidak di batasi dengan berat sampah nya namun biaya dihitung dari jauh dekatnya wilayah tersebut. Untuk penjemputan sampah gratis tidak dipungut biaya tetapi hanya diperuntukkan kepada sekolah dan tempat ibadah yang ada disekitar Kota Surabaya, ada persyaratan terkait penjemputan sampah gratis ini yaitu sampah harus mencapai kuota minimal 200 kg setara dengan satu motor tossa. Pada biaya nasabah dan perorangan sendiri berbeda, informasi terkait biaya ini disampaikan BSIS melalui kertas brosur ketika nasabah ingin bekerjasama dengan BSIS.

Dapat disimpulkan bahwa dalam dimensi konsistensi dalam melakukan komunikasi berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di BSIS sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat jelas dari jadwal penjemputan sampah yang sudah terstruktur dengan benar sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

Sumber daya

Sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan, keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah[15]. Sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya memberikan penjelasan bahwa sejelasa apapun kebijakan yang berlaku jika sumber daya pelaksana kebijakan tidak berkompeten dan kurang memadai dapat menimbulkan kebijakan yang tidak efektif [19]. Sumber daya memiliki peranan penting terhadap implementasi kebijakan, Edward membagi peranan tersebut menjadi 3 bagian sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Edward III menyatakan bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi kebijakan dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif [18]. Sumber daya manusia pada pelaksanaan Kebijakan pengelolaan sampah.

Tabel 1. Data Pegawai Bank Sampah Induk Surabaya & BSU Rafflesia

Unit Divisi	Jumlah
Pihak Yayasan Bina Bhakti Lingkungan	
Pembina	2
Pengawas	1
Ketua Yayasan	1
Ketua Umum	1
Pihak BSIS	
Direktur	1
Sekretaris Bendahara	1
Humas	1
Produksi	1
Teller	1
Karyawan Produksi	1

Pihak BSU Rafflesia	
Ketua	1
Wakil	1
Sekretaris	1
Bendahara	1
Sie Pemilahan	2
Sie Penjualan	2
Sie Kreativitas	2

Sumber: Data yang dioleh Peneliti, 2022

Sumber daya yang dimaksudkan yakni meliputi ketersediaan anggota tim kebijakan pengelolaan sampah dan tenaga kerja dari pihak yayasan yang bisa mensupport proses pelaksanaan Kebijakan pengelolaan sampah. Semua tenaga kerja menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan jobdesk yang sudah diberikan. Dalam hal ini pihak BSIS selaku pelaksana kebijakan di Kelurahan Ngagelrejo dibantu oleh pihak yayasan dalam hal mensupport dengan pembagian tupoksi sehingga dapat saling melengkapi.

Tentunya dari pihak BSIS maupun Yayasan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk membimbing warga dalam hal melakukan pengelolaan sampah dengan aman dan efisien. Dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah ini diharapkan masyarakat menjadi tahu akan betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terutama pada permasalahan sampah yang seharusnya bisa diolah kembali agar tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat menyebabkan timbulnya sarang penyakit. Disimpulkan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat memadai untuk dapat memastikan pengelolaan sampah di Kelurahan tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga terciptanya kebersihan lingkungan dan antusiasme masyarakat akan mengelola sampah yang masih bisa dikelola.

2) Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di BSIS terkait anggaran pada awalnya dibebankan kepada pembina sekaligus pendiri BSIS. Dana dari beliau merupakan dana pribadi begitupun juga gudang yang pertama kali digunakan oleh BSIS untuk mengumpulkan sampah terletak di rumah orangtua pemilik yaitu di Jl. Bratang Lapangan 1 No 54A. Pada awalnya rumah

tersebut dipinjamkan oleh beliau namun hitungannya akan tetap seperti hutang yang akan dibayar. Ibu Nurul selaku tim Humas menjelaskan bahwa anggaran tersebut dipergunakan untuk BSIS dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah serta kebutuhan yang lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pendiri agar BSIS dapat beroperasi dalam keadaan infrastruktur yang terbatas dengan baik. Bentuk upaya tersebut berupa ajakan kepada bank sampah yang sudah ada di Surabaya dan masyarakat sekitar untuk bekerjasama dan menjadi nasabah BSIS. Seiring berjalannya waktu jumlah sampah yang terkumpul setiap bulan dan jumlah nasabah mengalami perkembangan. Penambahan nasabah aktif BSIS sangat menguntungkan karena dengan bertambahnya nasabah tersebut dapat memberikan tambahan jumlah nasabah yang lebih besar sehingga produktivitas rata-rata nasabah meningkat dan operasional Bank Sampah Induk Surabaya berjalan dengan baik. Perkembangan tersebut membawa dampak positif yakni terjalinnya kerjasama antara BSIS dengan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Timur sejak tahun 2012 hingga saat ini. Kerjasama dilakukan dengan BSIS dalam bentuk CSR berupa penyaluran dan pemanfaatan dana CSR. Biaya operasional DI BSIS meliputi 60% nasabah, 40% gaji pegawai dan maintenance. Keuntungan yang didapat oleh BSIS totalnya sekitar Rp. 40.000.000/bulan. Terkait anggaran yang didapatkan oleh BSIS dari BSU Rafflesia yang merupakan salah satu BSU yang bekerjasama Di Kelurahan Ngagelrejo, total setiap bulannya sekali timbang Rp. 160.000.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk Kebijakan pengelolaan sampah dibebankan melalui biaya pribadi dari pihak BSIS sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan perkembangan jumlah nasabah dan menjadi mitra dari PT. PLN (persero) yang dapat membantu BSIS dalam menjalankan program-programnya terkait pengelolaan sampah.

3) Sumberdaya Fisik dan Peralatan

Sumber daya peralatan, berupa fasilitas fisik merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan, dan merupakan sumber daya penting dalam implementasi, tanpa adanya gedung, peralatan, perlengkapan, maka implementasi tidak akan berhasil[20]. Sumber daya fisik berupa sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo sudah cukup memenuhi kebutuhan. Untuk perlengkapan operasional di BSU seperti karung untuk pemilahan sampah dan penimbangan, Bsu yang aktif akan diberikan bantuan berupa timbangan, papan nama, buku administrasi atau buku tabungan. Untuk perlengkapan operasional tersebut difasilitasi oleh BSIS selaku penyelenggara di Kelurahan Ngagelrejo. Pihak dari BSU Rafflesia juga membantu menyediakan perlengkapan seperti gudang, meja, kursi untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah.

Sarana tersebut berguna untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi penumpukan sampah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pihak BSIS sudah memadai sehingga implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo dapat berjalan dengan baik.

Disposisi

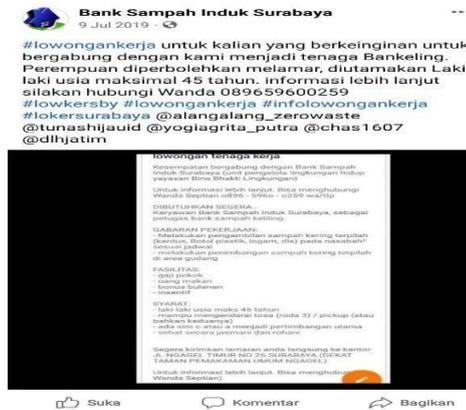
Disposisi diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan/program. Salah satu karakter yang diperlukan dan penting dalam pelaksana adalah kejujuran, demokrasi dan komitmen yang tinggi. Sikap kejujuran memberikan arahan kepada pelaksana untuk selalu berada pada arah program yang telah tertulis dalam kerangka program. Kejujuran dan komitmen akan membuat pelaksana lebih semangat dan berkomitmen dalam menjalankan tahapan program. Sedangkan sikap demokratis akan memberikan kesan baik bagi pelaksana dan kebijakan di depan anggota kelompok [21]. Beberapa Faktor yang menjadi pokok perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu:

1) Pengangkatan Pelaksana

Pengangkatan atau pemilihan pelaksana kebijakan merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi pada kebijakan yang sudah dibuat, terlebih pada tujuan kepentingan masyarakat. Pengangkatan pelaksana pada Kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kabupaten Surabaya terutama pada pegawai Bank Sampah Induk Surabaya sebagai pelaksana program bank sampah induk. Pengangkatan pelaksana Bank Sampah Induk Surabaya awalnya didasari pada permasalahan dari masih banyaknya masyarakat dari kelompok menengah

kebawah yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki pekerjaan sehingga dengan berdirinya Bank Sampah Induk Surabaya pendiri berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestari lingkungan dan juga petugas kebersihan untuk bergabung dalam pelaksana program yang dapat memberikan mereka pemasukan dari sampah yang mereka pilah.

Metode pengangkatan pelaksana:



Gambar 4. Lowongan Pekerjaan BSIS

- a. Pengangkatan Pelaksana Pada BSIS menggunakan metode rekrutmen secara terbuka dan tertutup.

Pada rekrutmen terbuka BSIS menyebar pamflet lowongan pada platform online seperti olx.com dan facebook, penggunaan sarana media sosial untuk mencari pelamar yang potensial akan dapat dengan mudah didapatkan [23]. Metode rekrutmen yang kedua yaitu secara tertutup, artinya BSIS menerima pegawai dari referensi manajemen melalui rekomendasi dari karyawan lain di dalam BSIS yang sudah mengetahui potensi serta keahlian dari calon pelamar yang direkomendasikan. Pengangkatan pelaksana/pegawai ini nantinya akan ditempatkan pada bagian tim produksi yang terdapat 3 yaitu pemilahan, penimbangan sampai pengemasan sampah. Pada kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Induk Surabaya dalam pengangkatan pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena pada setiap pelaksana yang tergabung dalam tim produksi (pemilah, penimbangan dan pengemasan) sudah diberikan tugas yang sesuai dengan latar belakang dan potensi pelaksana.

- b. Pengangkatan Pelaksana pada Bank Sampah Unit (BSU) Raflesia

Pengangkatan pelaksana BSU Raflesia menggunakan metode rekrutmen secara tertutup. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lina Rachmawati selaku pendiri serta ketua BSU Raflesia menjelaskan bahwa pengangkatan pengurus BSU dilakukan melalui rekrutmen secara tertutup, artinya dalam mencari pengurus BSU Ibu Lina membuat pemberitahuan lowongan pekerjaan melalui grup whatsapp rumpun warga dan juga Ibu Lina akan menunjuk warga yang berkenan untuk menjadi pegawai di BSU Raflesia. Pengangkatan pegawai akan ditempatkan pada bagian pemilahan, penjualan dan kreativitas.

2) Insentif

Pemberian insentif dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat menjadi *reward* yang akan mendorong pelaksana kebijakan pengelolaan sampah menjalankan tugas dengan baik. Secara langsung juga dalam penyediaan dana yang cukup untuk dipergunakan dalam memberi insentif bagi para pelaksana program supaya mereka mendukung dan bekerja dengan totalitas di dalam melaksanakan sebuah kebijakan/program [5].

- a. Pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Bank Sampah Induk Surabaya pada tahun 2017 sebelum berganti nama dari Bank Sampah Bina Mandiri mendapatkan kategori bank sampah terbaik sebagai bank sampah binaan PT. PLN (persero). Dari penghargaan tersebut, Bank Sampah Induk Surabaya menerima sebuah penghargaan dari PT. PLN (persero) berupa modal

pengoprasian bank sampah dimana pendanaan tersebut nantinya digunakan dalam menjalankan program Bank Sampah Induk Surabaya.

- b. Pemberian Intensif juga dilaksanakan dari BSIS untuk para pegawai/pelaksana program bank sampah. Intensif selain gaji yang diterima yaitu pemberian BPJS pada pegawai inti yang berstatus aktif bekerja. Syarat pemberian BPJS adalah pada pegawai inti berstatus aktif bukan pegawai borongan, pemberian BPJS akan dihentikan jika pegawai sudah tidak bekerja atau keluar.
- c. Intensif selanjutnya yang dilaksanakan oleh BSIS ditujukan oleh nasabah dan bank sampah unit yang bekerjasama aktif dengan BSIS. Intensif ini berupa seperti pemberian sembako dan bingkisan selama satu tahun sekali.
- d. Insentif pada Bank Sampah Unit Raflesia Kelurahan Ngagelrejo adalah pemberian sembako pada nasabah yang aktif serta mencapai maksimal target menabung sebagai nasabah individu. Pemberian ini dilakukan selama satu tahun sekali.

Struktur Birokrasi

Variabel Birokrasi mengacu pada struktur birokrasi berperan penting di sebuah implementasi kebijakan. Aspek birokrasi terbagi menjadi dua hal yaitu mekanisme serta struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure (SOP)* yang dicantumkan pada guideline program/kebijakan. SOP sendiri diartikan sebagai sebuah kegiatan bersifat rutin dimana mengharuskan para pegawai/pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya pada setiap hari yang mana sesuai standar yang ditetapkan [22]. Dua karakteristik utama dari sebuah birokrasi yaitu diantaranya:

1. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Kejelasan dari standar operasional prosedur, melibatkan mekanisme, pembagian tugas pokok, sistem serta sebuah prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, fungsi dan wewenang, tanggung jawab antar pelaku kebijakan yang memastikan keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dalam kebijakan pengelolaan sampah dibutuhkan inovasi atau cara kerja baru sebagai optimalisasi dari cara kerja yang sudah dilakukan namun masih kurang optimal dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan pengelolaan sampah pada program Bank Sampah Induk Surabaya dibawah naungan Yayasan Bina Bhakti Lingkungan dan dalam binaan PT. PLN (persero) memiliki SOP, yang digunakan sebagai acuan dari mekanisme, sistem dan sumber daya.



Gambar 5. Buku Petunjuk Pemilahan Sampah

Mekanisme prosedur dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya terdapat pada buku petunjuk pemilahan sampah dari BSIS. Dalam buku petunjuk tersebut terdapat mekanisme prosedur operasional bank sampah yaitu:

- 1) Pertama adalah dalam pembentukan tim pelaksana program tersebut terdiri dari pembina, pengawas, direktur, sekretaris&bendahara, hubungan masyarakat, tim produksi (pemilah, penimbangan dan pengemasan) dan teller.
- 2) Kedua, menentukan jenis sampah yang akan diterima beserta harga yang akan diterima nasabah bank, dalam penentuan harga jenis sampah Bank Sampah Induk Surabaya bersifat naik turun

karena mengikuti kurs dollar yang terkadang naik turun.

- 3) Ketiga, SOP sebagai nasabah bank sampah adalah setiap masyarakat yang ingin menabung/menjadi nasabah di BSIS terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai nasabah individu dengan mengisi formulir yang berisi (No. KTP/SIM, Nama, No Telp, TTL, Alamat, Kategori nasabah individu) dan jika nasabah kolektif mengisi formulir dan MoU yang berisi (Nama kelompok, Alamat kelompok, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan Jabatan dalam kelompok) dalam tahap ini nasabah akan menerima buku tabungan yang nantinya harus dibawah sebagai bukti catatan setiap kali menabung.
- 4) Keempat, setiap nasabah yang menabung atau menyerahkan sampah harus dalam keadaan bersih atau sudah dipilah yang kemudian dapat langsung diserahkan untuk ditimbang di tempat BSIS dalam tahap ini juga nasabah akan mengisi daftar hadir nasabah yang berisi (nama, tanda tangan).
- 5) Kelima, proses penimbangan yang dilakukan oleh pegawai BSIS pada bagian produksi, dalam tahap ini akan ditimbang serta ditentukan harga dari jumlah sampah yang diserahkan dengan catatan harga dari setiap jenis sampah berbeda.
- 6) Keenam, proses pencatatan jumlah rupiah yang akan diterima nasabah dalam buku tabungan dan pencatatan pada administrasi BSIS, dalam tahap ini penulisan pada buku tabungan nasabah secara otomatis menggunakan mesin cetak passbook dan pendataan dalam BSIS menggunakan program komputer seperti Ms. Excel. Dalam sistem penerimaan rupiah, para nasabah akan diberikan pilihan apakah akan dibayarkan dengan uang atau dialokasikan pada pembayaran listrik rumah tangga. Mengingat BSIS merupakan bank sampah binaan dari PT.PLN maka diberikan akses untuk melakukan pembayaran melalui sampah yang ditabung.
- 7) Ketujuh, nasabah yang ingin menarik tabungan mempunyai ketentuan dengan minimal selama 3 bulan per penarikan.
- 8) Kedelapan, dalam mekanisme bank sampah setelah sampah terkumpul, terpilah, dan sudah dikemas sesuai standar pengemasan BSIS maka sampah siap untuk dijual ke pengepul sampah.

Mekanisme untuk nasabah kolektif sedikit berbeda dengan nasabah individu, karena dalam penyeteroran sampah pada nasabah kolektif akan diambil/dijemput oleh pihak BSIS, penjemputan sampah ini disebut Bangkeling (Bank Sampah Keliling). Dalam Bangkeling memiliki dua kategori yaitu Bangkeling gratis, dan BANGKELING berbayar. Bangkeling berbayar ditujukan untuk nasabah individu maupun unit dan nasabah perusahaan. Bangkeling gratis hanya untuk sekolah dan tempat ibadah, ketentuan untuk sistem gratis adalah dengan minimal total sampah yang diambil sekitar 200 kg/setara dengan muatan satu motor tossa. Bangkeling berbayar bebas dalam jumlah minimal sampah yang akan diangkut serta seberapa jauh lokasi penjemputan. Sistem penentuan harga ditentukan dengan jenis armada yang digunakan untuk menjemput serta jarak titik jemput, sedangkan penetapan harga dari jauh dekatnya lokasi penjemputan menggunakan patokan harga yang mendekati dengan harga dari aplikasi ojek online.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo telah sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam implementasi, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana.

2. Fragmentasi

Fragmentasi dimaknakan sebagai penyebaran sebuah tanggung jawab dari kebijakan pada beberapa bagian yang berbeda sehingga perlu adanya koordinasi dari setiap bagian tersebut [20]. Umumnya, jika semakin besar koordinasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang peluang berhasilnya program atau kebijakan. Fragmentasi menyebabkan sebuah pandangan yang dangkal dari banyak lembaga birokrasi. Dari hal ini menumbuhkan dampak utama yang merugikan bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

Pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Surabaya, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo terdapat pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas di masing-masing bagian sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berikut struktur pelaksanaan kebijakan Bank Sampah Induk Surabaya Kelurahan Ngagel,

Kecamatan Wonokromo:

- 1) Ibu Anindita Normaria Samsul dan Ibu Nurhida Ramadhani sebagai Pembina serta pendiri Bank Induk Surabaya. Beliau merupakan pembina dari Yayasan Bina Bhakti Lingkungan serta ikut turut membantu dalam mengenalkan BSIS ke Media. Tugas pokok dari pembina yaitu mengawasi jalannya Bank Sampah
- 2) Ibu Diarany Sucahyati, S.A. sebagai Pengawas. Tugas Pokok dari pengawas yaitu melakukan pengawasan keuangan pada kegiatan BSIS
- 3) Bapak Amir sebagai Ketua Umum
- 4) Bapak Anjar Putro W, S.Kom.I sebagai Ketua Pelaksana yang bertugas mengontrol kegiatan di Bank Sampah
- 5) Bapak Maulana Adam sebagai Direktur dari BSIS yang dibantu beberapa tim yaitu Ibu Nur Aniya Fariza, S.E sebagai sekretaris dan bendahara, dan Ibu Nurul Chasanah, S.Kom.I sebagai hubungan masyarakat dan pemberdayaan. Tugas Pokok dari tim ini yaitu untuk melayani transaksi nasabah serta tim Administrasi yang bertugas untuk mencatat barang yang masuk dan keluar
- 6) Bapak Wanda Septian sebagai tim produksi. Dalam tim produksi terbagi dalam bagian pengambilan (Bangkeling) dan tim gudang (pemilah, penimbangan dan pengemasan).

Berdasarkan hal tersebut penyebaran tanggung jawab serta tugas pokok pada beberapa divisi yang berbeda telah dilaksanakan dengan baik. Dapat dilihat dari penyebaran tugas pokok pada beberapa divisi dari Bank Sampah Induk Surabaya dan Bank Sampah Unit Raflesia yang sesuai dengan bidangnya serta sudah dilakukan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam program Bank Sampah Induk Surabaya dan Bank Sampah Unit Raflesia di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Sehingga dengan penyebaran tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas tersebut pelaksanaan program bank sampah dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam perda No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kota surabaya yang dilaksanakan di Bank Sampah Induk dapat dilihat dari teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan Perda No. 5 Tahun 2014 dalam pengelolaan sampah di kota Surabaya.

Adanya Bank Sampah Induk Surabaya menimbulkan dampak sosial (perilaku untuk membuang sampah pada tempatnya, perilaku memilah sampah, dampak ekonomi (menambah pendapatan), dan dampak lingkungan (berkurangnya tumpukan sampah di TPS dan lingkungan menjadi bersih). Adapun implementasi kebijakan pengelolaan sampah program BSIS yang dilaksanakan di Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dapat dilihat dari implementasi kebijakan oleh George Edward III yang memiliki indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di desa Ngagelrejo sudah berjalan baik, ditinjau dari proses penyaluran informasi (transmisi) sudah dilakukan dengan baik melalui grup Whatsapp, dan informasi mengenai pengumpulan sampah dan pemilahan sampah sudah tersampaikan dengan baik dan jelas ke warga.

2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya memberikan penjelasan bahwa sejelas apapun kebijakan yang berlaku jika sumber daya pelaksana kebijakan tidak berkompeten dan kurang memadai dapat menimbulkan kebijakan yang kurang efektif. Dengan adanya kebijakan, semua tenaga kerja menjalankan tugasnya sesuai dengan *jobdesc* yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pihak BSIS selaku pelaksana kebijakan di kelurahan Ngagelrejo

dibantu oleh pihak yayasan dalam pembagian tupoksi dan dapat saling melengkapi.

3. Disposisi

Disposisi disebut sebagai karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan, diantaranya karakter yang harus dimiliki yaitu kejujuran, demokratis dan komitmen yang tinggi. Dengan kejujuran akan mengarahkan implementor untuk selalu dalam arahan program yang tertulis dalam kerangka kerja program. Kemudian pemberian intensif untuk pegawai atau pelaksana program bank sampah selain gaji yang diterima adalah BPJS pada pegawai inti yang bersatus aktif bekerja. Namun, tidak hanya pegawai saja yang mendapatkan intensif melainkan juga nasabah dan bank sampah unit yang bekerjasama dengan BSIS juga mendapatkan intensif berupa sembako ataupun bingkisan selama satu tahun sekali.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di BSIS telah sesuai dengan mekanisme yang telah digunakan dalam implementasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan pengelolaan sampah pada program BSIS dibawah naungan Yayasan Bina Bhakti Lingkungan dan juga binaan PT. PLN (pesero) memiliki SOP yang digunakan sebagai acuan dari mekanisme sistem dan sumber daya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada para pelaksana kebijakan Mengembangkan bank sampah Di masa depan, teknologi persampahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sangat diperlukan. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan memotivasi pelanggan dengan memberi harga yang lebih tinggi untuk sampah. Selain itu, diperlukan akan dukungan dan peran dari pemerintah daerah.

1. Pada indikator komunikasi. Memerlukan komunikasi yang efektif antar anggota seperti grup whatsapp yang aktif, agar tercipta kesamaan pandangan antar anggota
2. Pada indikator sumber daya terkait dengan sumber daya manusia agar merekrut pegawai yang berketrampiln, berdedikasi, dan kompeten, sedangkan terkait sumber daya anggaran memberikan hibah atau pinjaman modal terutama untuk BSU atau program lainnya, sebab tanpa anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan.
3. Pada indikator disposisi. BSIS sebaiknya mempunyai komitmen yang tinggi agar selalu berantusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab.
4. Pada indikator struktur birokrasi dalam hal prosedur pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan perlu tetap menjalin hubungan dengan berbagai pihak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1] D. J. P. S. L. dan B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," 2021. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (accessed Jun. 24, 2022).
- [2] S. Widyati, C. Meidiana, and K. E. Sari, "Efektivitas Dan Efisiensi Bank Sampah Induk Surabaya," *Planning for Urban Region and Environmen*, vol. 11, no. 2, pp. 41–48, Apr. 2022.
- [3] Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, "Sejarah Berdiri." [https://www.yayasanbinabhaktilingkungan.or.id/tentang-kami/sejarah-berdiri/#:~:text=7%20Maret%202017%20Berganti%20Nama%20Menjadi%20Bank%20Sampah,dari%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan%20Republik%20Indonesia.\(accessed Jun. 24, 2021\).](https://www.yayasanbinabhaktilingkungan.or.id/tentang-kami/sejarah-berdiri/#:~:text=7%20Maret%202017%20Berganti%20Nama%20Menjadi%20Bank%20Sampah,dari%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan%20Republik%20Indonesia.(accessed%20Jun.%2024,%202021).)
- [4] D. Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar," *Jurnal Ilmu Wawasan Insa Akad*, vol. 1, no. 3, pp. 13–26, 2018.
- [5] L. Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [6] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Revision*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

- [7] A. Mufiz, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, 3rd ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022.
- [8] R. Nugroho, Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis kebijakan, manajemen kebijakan, 3rd ed. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- [9] Y. Pangalila, J. Kaawoan, and N. Kumayas, "Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 3, pp. 1–9, 2019.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [11] S. Sutikno and P. Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica, 2020.
- [12] R. Kriyantono, "Analisis Isi Skripsi Kehumasan di Perguruan Tinggi," *ARISTO*, vol. 8, no. 1, p. 111, Jan. 2020, doi: 10.24269/ars.v8i1.2265.
- [13] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, pp. 81–95, Jun. 2018.
- [14] G. Salman, "Kelurahan Ngagelrejo Langganan Banjir sejak 25 Tahun Lalu, Ini Kata Eri Cahyadi," 2022. Accessed: Jun. 24, 2022. [Online]. Available: <https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/18/212302778/kawasan-ngagel-surabaya-langganan-banjir-sejak-25-tahun-lalu-ini-kata-eri?page=all#page2>
- [15] I. Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, 2nd ed. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- [16] Q. Ramadhani, "Cara Kelola Sampah dengan 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot)," <https://kumparan.com/qorirn1913/cara-kelola-sampah-dengan-5r-refuse-reduce-reuse-recycle-rot-1wxQmAYkbcD/full>, Nov. 21, 2021.
- [17] Nursalim, "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 5, no. 3, pp. 117–126, 2018.
- [18] N. S. Chrisyanto, Noviyanti, and I. F. Effendi, "Implementation of Work from Home Policy at PT. Masaji Tatanan Kontainer Indonesia," in *The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS)*, Jakarta: KnE Social Sciences, May 2022, pp. 1021–1037.
- [19] D. Setyawan, A. Priantono, and F. Firdausi, "George Edward Iii Model: Implementation Of Regional Regulation Number 2 Of 2018 Regarding NO-Smoking AREA IN MALANG CITY," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, vol. 3, no. 2, pp. 9–19, Jul. 2021, doi: 10.51747/publicio.v3i2.774.
- [20] N. Nurlailah, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu," *Jurnal Dinamika*, vol. 1, no. 2, pp. 59–68, Oct. 2021, doi: 10.54895/dinamika.v1i2.1135.
- [21] T. Turhindayani, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, vol. 4, no. 4, Sep. 2020, doi: 10.22146/abis.v4i4.59322.
- [22] R. H. Putra and A. Khaidir, "Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, vol. 15, no. 1, pp. 236–242, Jun. 2019.